



Radar Bali



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

MULAI BEKERJA: Beberapa desa sudah mulai merealisasikan program pasca Pemkot Denpasar menganggarkan dana desa. Seperti yang tampak di Desa Peguyangan, Denpasar Utara, ini.

Diminta Hentikan Pungli

DENPASAR - Besarnya dana desa yang dikurirkan Pemerintah Kota Denpasar mulai 2015 ini, ternyata menyisakan masih banyak persoalan. Khususnya masalah pungutan liar (pungli) beberapa oknum desa yang masih saja terjadi. Walaupun dana desa untuk operasional desa padahal terbilang cukup tinggi ■

► Baca *Diminta...* Hal 31

Utamakan Program Menyentuh Rakyat

■ DIMINTA...

Sambungan dari hal 21

Hal tersebut pun mendapat sorotan dari beberapa anggota DPRD Kota Denpasar, Senin kemarin (31/8). Dalam kesempatan tersebut anggota DPRD pun menilai, masih banyak desa yang ada di Kota Denpasar justru masih melakukan beberapa pungutan yang seharusnya tidak terjadi.

Anak Agung Ketut Sujana, mantan Kepala Desa Pemogan yang sekarang duduk sebagai anggota DPRD Kota Denpasar dari PDIP pun meminta agar segala pungutan yang terjadi selama ini segera dihentikan. Misalnya saja ketika masyarakat mengurus beberapa administrasi di desa justru harus membayar dengan sejumlah uang.

"Saat ini dana desa sudah cukup besar. Jadi janganlah oknum-oknum di desa memungut uang lagi kepada masyarakat. Contoh misalnya, baru tanda tangan saja sudah memungut sejumlah uang," tegasnya, saat ditemui di kantor DPRD Kota Denpasar, kemarin.

Ketut Sujana pun mengapresiasi langkah pemerintah Kota

Denpasar mengucurkan dana desa tersebut. Meski demikian, menurutnya, pihak desa tetap harus didorong dalam hal penganggaran dana tersebut harus benar-benar mampu menyentuh kepentingan masyarakat langsung.

Ia pun berharap, dana desa bisa dimanfaatkan dengan baik oleh desa dengan berpatok pada aturan yang ada. "Harus diperhitungkan juga mana yang bisa menyentuh masyarakat dan mana yang tidak. Sehingga bisa dana yang besar tidak sia-sia. Walaupun nanti akan berujung Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran, Red), tetapi penggunaannya jelas dan bermanfaat," terang Ketut Sujana.

Sementara itu, Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Denpasar Ida Bagus Kiana mengatakan hal yang sama dengan Ketut Sujana. Hanya saja pemerintah juga mesti mengawasi dan ikut serta memantau desa, apalagi selama ini banyak sekali keluhan masyarakat atas beberapa pungutan di desa terutama ketika mengurus beberapa administrasi yang se-

harusnya merupakan tugas dari desa sendiri.

"Masyarakat juga harus berani bersuara jika ada pungutan liar di desa. Karena sekarang semestinya desa yang melayani masyarakat dengan maksimal setelah turunnya dana desa yang cukup besar," tegas pria yang juga pernah menjabat Kepala Desa Sanur Kaja tersebut.

Sementara itu, AA Susruta Ngurah Putra Ketua Fraksi Demokrat, menginginkan agar dana desa yang cukup besar tersebut dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat termasuk dalam hal administrasi.

"Termasuk yang berbau administrasi. Desa harus memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat," imbuhnya.

Sebelumnya diketahui Pemerintah Kota Denpasar, menambah dana desa pada APBD Perubahan Kota Denpasar yang semula sebesar Rp 32 miliar lebih pada APBD Induk, menjadi Rp 108 miliar lebih pada APBDP. Setiap desa pun akan mendapat jatah Rp 2,5 miliar hingga Rp 3,5 miliar per desa. (hen/yes)

Edisi : Selasa, 1 September 2015
Hal : 21 dan 31



Ketika KKP Pratama Singaraja Menindak Wajib Pajak Bandel

Nunggak Pajak Rp 1,1 Miliar,

Dua Ruko Akhirnya Disita Petugas

Dua buah ruko di kawasan Singaraja Square, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, disita petugas dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. Kedua ruko ada di kavling C12 dan C15.

EKA PRASETYA, Singaraja

RUKO itu disita karena menunggak pajak pada 2011 lalu. Nilai tunggakan-nya terbilang besar, mencapai Rp 1,17 miliar. Sebelum disita, KPP Pratama Singaraja sebenarnya sudah berupaya



EKA PRASETYA/RADAR BALI

TEGAS: Petugas KKP Pratama Singaraja saat menyegel dua ruko milik wajib pajak bandel di Singaraja Square.

melakukan pendekatan persuasif. Hanya saja upaya pendekatan itu tak mendapatkan respons dari penunggak pajak. Akhirnya kantor pajak terpaksa melakukan upaya penyitaan, dengan harapan penunggak pajak mau melunasi tunggakan pajaknya.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja Muhammad Riza yang dikonfirmasi, Senin (31/8) kemarin membenarkan jika pihaknya menyita dua buah ruko di kawasan Singaraja Square. Wajib pajak memiliki tunggakan senilai Rp 1,17 miliar pada tahun pajak 2011, dan telah melalui audit pada tahun 2013.

Riza mengatakan, wajib pajak kurang lancar dalam melaksanakan kewajibannya perpajakannya, yaitu dalam melunasi utang pajaknya.

Wajib pajak sebenarnya sempat mencicil utang pajaknya namun tidak dilanjutkan lagi.

Kantor pajak, jelas Riza, sebenarnya sempat berusaha memblokir rekening wajib pajak. Namun saat itu bank menjawab tidak ada saldo dalam rekening yang menjadi sasaran pemblokiran. Selain itu, terdapat perbedaan antara data yang diajukan permintaan blokir, dengan rekening yang ada.

"Alamat kantornya juga sudah tidak sesuai dengan data alamat yang terdaftar. Demikian juga dengan alamat kantor pusatnya yang berpindah-pindah," jelas Riza.

Atas prosedur itu, KPP Pratama Singaraja berturut-turut menerbitkan surat teguran, surat paksa,

hingga permintaan pemblokiran rekening ke beberapa bank. Penyitaan pun dilakukan dengan dasar berita acara nomor BA-44/WPJ.17/KP.0304/2015 yang dimiliki oleh penanggung pajak, baik itu direktur dan komisaris.

"Sekarang kami terpaksa sita asetnya sebagai jaminan. Kalau tidak dilunasi juga, bisa saja kami melelang aset yang kami sita," imbuhnya. Saat ini KPP Pratama masih melakukan inventarisasi serta audit terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Apabila penunggak pajak masih membandel, pihaknya mengancam melakukan upaya paksa berupa penyitaan asset, pelelangan, bahkan tak menutup kemungkinan ada sanksi kurungan. (*gup)

Edisi : Selasa, 1 September 2015

Hal : 24



Lagi, Kuta Terancam Tenggelam



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

SEPARO JALAN: Proyek penataan Tukad Mati di Jaba Jero, Kuta, kini dihentikan mendadak Dishut Provinsi Bali.

Penataan Tukad Mati Dihentikan Mendadak

MANGUPURA - Gawat! Kecamatan Kuta kembali terancam tenggelam saat musim penghujan tiba. Tidak hanya Kuta, daerah lain seperti Seminyak, Legian, Tuban, dan Nusa Dua juga akan kembali terendam banjir. Pasalnya, proyek penataan Tukad Mati di Lingkungan Jaba Jero, Kuta, dihentikan mendadak oleh Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Bali.

Lokasi proyek didatangi belasan Polisi Kehutanan (Polhut) dan meminta segala aktivitas tidak dilanjutkan. Pembuatan *longstorage* dan penguatan dinding sungai yang menelan dana Rp 47 miliar itu pun juga terancam mangkrak. "Ya, memang dihentikan, mulai hari Sabtu lalu.

Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena memang dilarang tidak ada aktivitas (DI Tukad Mati, Red)," kata Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga dan Pengairan (BMP) Badung IB Surya Suamba kepada koran ini kemarin (31/8).

Kenapa bisa dihentikan, padahal proyek sudah berjalan? Ditanya begitu, Surya menjelaskan, proyek dihentikan karena menurut Dishut Provinsi Bali, aliran Tukad Mati berada di blok/zona perlindungan. Sehingga tidak boleh dilakukan aktivitas apapun.

Kembali ditanya soal anggaran Rp 47 miliar yang diambil dari APBD Badung 2015, Surya mengaku akan kembali membahas dengan pimpinan. Namun, jika tetap *deadlock* tidak ada jalan keluar, maka separo dari anggaran

tersebut akan dikembalikan ke kas daerah. "Sekarang pengerjaannya sudah 50 persen, tinggal sedikit lagi selesai. Tapi karena dihentikan, yam mau bagaimana lagi. Sisa anggaran dikembalikan lagi," beber pria Kabid Jalan dan Jembatan Dinas BMP ini.

Langkah selanjutnya? Surya tidak bisa menjelaskan. Pihaknya sedang menyiapkan usulan untuk perubahan zona, agar proyek ini dapat berjalan. Ada tiga lokasi selain Tukad Mati, yaitu Muara Tukad Teba di Jimbaran dan Muara Tukad Bualu di Nusa Dua. "Agar setelah blok perlindungan menjadi blok pemanfaatan, supaya secara rutin kami bisa memelihara itu, agar kawasan Kuta, Nusa Dua tidak banjir," tandasnya.

Menurutnya, penataan Tukad



Radar Bali

Sambungan...



Ya, memang dihentikan, mulai hari Sabtu lalu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena memang dilarang tidak ada aktivitas (DI Tukad Mati, Red)."

IB SURYA SUAMBA
Kadis BMP Badung

Mati murni bertujuan menanggulangi bencana banjir yang setiap tahun selalu menenggelamkan Kuta. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dishut Provinsi Bali maupun Direktorat

Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). BMP juga sudah berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Taman Hutan Raya (Tahura) serta Dinas Kehutanan Provinsi Bali. Pihaknya disarankan untuk mohon izin pelaksanaan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengingat aliran sungai tersebut berada pada kawasan Tahura Ngurah Rai Blok Perlindungan.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian LHK Republik Indonesia telah membalas dengan surat No. S.431/VII-KK-BHL/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Normalisasi Sungai Tukad Mati di Blok Perlindungan Taman

Hutan Raya Ngurah Rai, Kabupaten Badung. "Intinya dalam surat itu pembangunan *long storage* dipandang perlu dan strategis dalam penaganan sampah pencegahan banjir, dan pengelolaan Tahura," imbuh Surya.

Bahkan, imbuh dia, karena telah melaksanakan normalisasi muara Tukad Mati sebagai kegiatan rutin penaganan sampah dan pengendalian banjir di kawasan pariwisata Kuta, Legian, dan Seminyak, pemerintah pusat menilai pelaksanaan kegiatan normalisasi dan pembangunan *long storage* di muara Tukad Mati perlu mendapatkan dukungan, berkenaan dengan alokasi anggarannya telah tersedia melalui APBD 2015.

Panjang Tukad Mati sekitar 14 kilometer, dengan hulu di Jalan Imam Bonjol, Denpasar. Sementara pembangunan *long storage* sepanjang 500 meter. Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati (Pj) Badung I Nyoman Harry Yudha Saka mengaku sudah menyiapkan permohonan kepada Gubernur dan akan disampaikan kepada Kementerian LHK agar ada perubahan zonasi. "Ini masalah koordinasi saja. Tukad Mati juga merupakan bagian yang penting di dalam menangani masalah banjir, bukan kegiatan yang bersifat profit tetapi menyelamatkan lingkungan dan melestarikan mangrove," jelas Karo Organisasi Pemprov Bali itu. (san/djo)



Radar Bali

Perbikel Pertanyakan Isu Hotmix Jalan Dihapus

BANGLI, NusaBali

Santer beredar isu bahwa program aspal hotmix jalan dibakal dihapus dalam APBD Perubahan Bangli membuat puluhan perbikel Senin (31/8), mendatangi Pemkab dan DPRD Bangli. Kedatangan para perbikel yang dipimpin Ketua Forkomdes Bangli, I Made Diksa tersebut untuk meminta kejelasan mengenai kebenaran isu itu.

Di Pemkab Bangli, mereka diterima Sekkab Bangli, Ida Bagus Gede Giri Putra. Sementara di DPRD Bangli, mereka diterima Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata dan sejumlah anggotanya.

Made Diksa mengatakan pihaknya datang ingin memper-



• NUSABALI/DEWA

PULUHAN Perbikel saat dialog di Kantor DPRD Bangli, kemarin.

tanyakan masalah pengaspalan homix di 15 ruas jalan desa di Bangli. Sebab, mantan Bupati Bangli, Made Gianyar, sebelumnya berkomitmen bakal melanjutkan aspal hotmix tersebut. Sementara belakangan ini, santer terdengar isu kalau jalan hotmix bakal dihapus. Dugaan

hotmik dihapus diperkuat, saat pembahasan APBD Perubahan aspal hotmix tidak pernah dibahas.

Ketua DPRD Bangli, Ngakan Kutha Parwata usai menerima kedatangan perbikel menyebutkan inti kedatangan mereka ke DPRD Bangli dan eksekutif

adalah untuk mempertanyakan adanya isu kalau 15 paket aspal hotmix dihapus. Padahal, aspal hotmix di 15 ruas jalan ini sudah dibahas dalam Musrenbang dan masuk dalam anggaran Induk 2015.

Selanjutnya, kata Kutha, pihaknya sudah memberikan penjelasan mengenai dengan nasib aspal hotmix di 15 ruas jalan tersebut. Dimana, intinya aspal hotmix ini tidak dapat diambil dalam APBD perubahan lantaran mepetnya waktu pengerjaan.

Disamping itu, dana jalan hotmix tergolong besar, per paket mencapai Rp 1 miliar. "Jadi bukan dihapus, namun 15 ruas jalan hotmix ini bakal menjadi prioritas dalam APBD

Induk tahun 2015. Bakal diprioritaskan pada tahun 2016 mendatang,"terang Kutha.

Sementara Kabid Bina Marga, Putu Widagunawan mengatakan masa pengerjaan aspal hotmix memang tidak dapat terkejar dalam waktu tersisa ini. Untuk tender pengaspalan jalan hotmix membutuhkan waktu sekitar 42 hari, dan sebelumnya juga diisi dengan survei.

Sejauh ini APBD Perubahan pun belum ketok palu, jadi limit waktu pengerjaannya sangat sempit. Maka, pihaknya akan menempatkan 15 ruas jalan hotmix ini menjadi prioritas tahun 2016. Total jalan hotmix tersebut membutuhkan dana sekitar Rp 11 miliar. **cr53**

Edisi : Selasa, 21 September 2015

Hal : 8

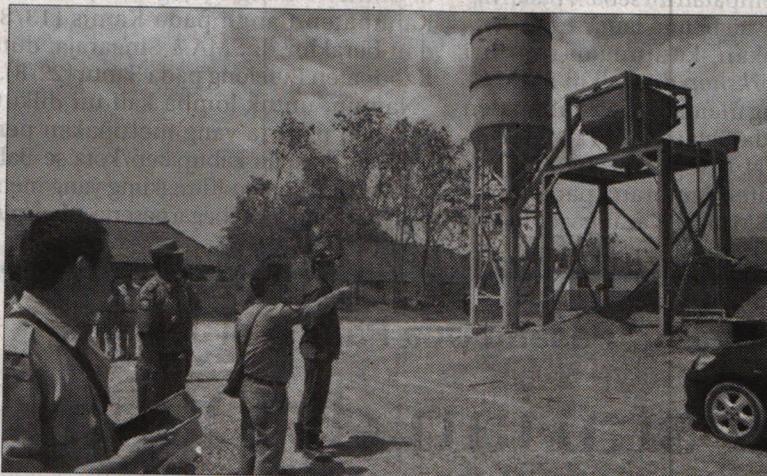


Radar Bali

Sempat Disegel, Beroperasi Lagi

SINGARAJA - Sempat disegel pada awal Agustus lalu, pabrik pengolahan semen menjadi beton atau *mixing plant* yang berdiri di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, kini beroperasi lagi. Meski beroperasi lagi, ternyata perusahaan itu tak kunjung memenuhi persyaratan berinvestasi. Kesan tebang pilih pun muncul. Sebenarnya perusahaan itu sudah sempat disegel Badan Polisi Pamong Praja dan Linmas Buleleng, pada 5 Agustus 2015 lalu. Namun dalam perjalanannya perusahaan kembali berjalan dan menyuplai beton ke sejumlah kontraktor yang ada di Buleleng.

Sekretaris Tim Investasi Pemkab Buleleng Ketut Suparto yang dikonfirmasi Senin (31/8) kemarin, mengakui perusahaan dengan nama CV. Adhi Jaya Beton itu sudah beroperasi di Desa Bungkulan. Namun perusahaan itu belum mengantongi izin-izin yang diperlukan. Suparto mengaku semula perusahaan diberikan kelonggaran



EKA PRASETYA/RADAR BALI

TEBANG PILIH: Mixing plant CV. Adhi Jaya Beton yang masih beroperasi meski tak berizin.

beroperasi sambil mengurus dokumen perizinan. Lantaran perusahaan itu menyuplai beton untuk pembeconan di Jalan Udayana dan Jalan Kartini, serta pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Buleleng. Namun faktanya hingga pekerjaan usai, perusahaan masih beroperasi dan belum mengantongi izin. "Belum ada kami terbitkan rekomendasi, karena ada syarat-syarat yang belum lengkap," kata

Suparto. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara, meminta agar pemerintah tidak tebang pilih. Apalagi sesuai dengan Perda 9 Tahun 2013, Desa Bungkulan bukan kawasan industri. "Ini *kan* bisnis, namanya bisnis *kan* ada aturan investasinya, silahkan diikuti. Selain itu lokasinya *kan* bukan di kawasan industri, nah ini harus diperhatikan juga," kata Susila. (eps/gup)

Edisi : Selasa, 1 September 2015

Hal : 24